



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
KUPANG

Kupang, 17 - 07 - 2024

Nomor : BU.700/10 /Inspektorat/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan  
bulan April, Mei, dan Juni 2024.

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT  
masing-masing (daftar terlampir)  
di -  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan hasil rekapitulasi penyampaian LHKPN per tanggal 30 Juni 2024 tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) baru mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN sebanyak 1024 WL dari 1060 WL sedangkan yang belum melapor sebanyak 36 orang, maka disampaikan bahwa :

1. Per tanggal 31 Maret 2024
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai 95,57% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1013 WL sedangkan yang belum melapor sebanyak 47 WL.
  - b. Rekapitulasi per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 31 Maret 2024 sesuai Lampiran I.
  - c. Rekapitan ASN yang telah melapor LHKPN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 31 Maret 2024 sesuai Lampiran V.
  - d. Rekapitan ASN yang belum melapor LHKPN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 31 Maret 2024 sesuai Lampiran VI.
2. Per tanggal 30 April 2024
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 30 April 2024 mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1024 WL dengan yang belum melapor sebanyak 36 WL.
  - b. Rekapitulasi per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 30 April 2024 sesuai Lampiran II.

- c. Rekapan ASN belum melapor LHKPN per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 30 April 2024 sesuai Lampiran VII.
- 3. Per tanggal 31 Mei 2024
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1024 WL dengan yang belum melapor sebanyak 36 WL.
  - b. Rekapitulasi Per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 31 Mei 2024 sesuai Lampiran III.
  - c. Rekapan ASN belum melapor LHKPN per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 31 Mei 2024 sesuai Lampiran VIII.
- 4. Per tanggal 30 Juni
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1024 WL dengan yang belum melapor sebanyak 36 WL.
  - b. Rekapitulasi per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 30 Juni 2024 sesuai Lampiran III.
  - c. Rekapan ASN belum melapor LHKPN per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 30 Juni 2024 sesuai Lampiran VIII.
- 5. Seluruh wajib LHKPN yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran Surat Kuasa atas nama Penyelenggara Negara /Wajib LHKPN, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertanda tangan diatas materai Rp.10.000) agar mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN;
- 6. Pimpinan Perangkat Daerah agar menyampaikan Rekapitulasi ASN yang telah melapor LHKPN Tahun 2024 kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat tanggal 15 Juli 2024;
- 7. Bagi Wajib Lapor LHKPN hingga tanggal 30 Juni 2024 belum melaporkan LHKPN Tahun 2024 maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Tidak diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
  - b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - c. Pembebasan dari Jabatan Struktural.



8. Untuk Informasi lebih lanjut, melalui Klinik Konsultasi Pengawasan No. HP 081238395544, menghubungi Bernad Kedang (Admin LHKPN) No. HP 081337331568.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Daerah

u.b

Asisten Pemerintahan dan Kesra,





**Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196505161993032009

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Inspektur Provinsi NTT.

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
PLH SEKRETARIS	

## LAMPIRAN I

REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 31 MARET 2024

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Tepat Waktu	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Badan Kepegawaian Daerah	11	11	11	0	100,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	2	2	1	66,67
3.	Badan Keuangan Daerah	26	23	23	3	88,46
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	5	0	100,00
5.	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	136	132	132	4	97,06
6.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	7	0	100,00
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	5	5	0	100,00
8.	Badan Penghubung Daerah	3	3	3	0	100,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	33	32	32	1	96,97
10.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	43	43	43	0	100,00
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	4	4	0	100,00
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63	62	62	1	98,41
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	12	0	100,00
14.	Dinas Kesehatan	45	43	43	2	95,56
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	5	5	1	83,33
16.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	14	0	100,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	0	100,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	155	148	148	7	95,48
19.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	5	5	0	100,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	65	59	59	6	90,77
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	7	7	0	100,00
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	4	4	1	80,00
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	13	2	86,67
24.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37	34	34	3	91,89
25.	Dinas Perhubungan	48	47	47	1	97,92
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	18	18	0	100,00
27.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51	49	49	2	96,08
28.	Dinas Peternakan	26	25	25	1	96,15
29.	Dinas Sosial	18	16	16	2	88,89
30.	Inspektorat Daerah	82	82	82	0	100,00
31.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	32	29	29	3	90,63
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	4	4	2	66,67
33.	Sekretariat Daerah	65	62	62	3	95,38
34.	Sekretariat DPRD	7	6	6	1	85,71
35.	Staf Ahli	1	1	1	0	100,00
	Total	1060	1013	1013	47	

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra,



Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196505161993032009

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	3
PLH SEKRETARIS	1





LAMPIRAN II

REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 30 APRIL 2024

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Tepat Waktu	Belum Lapor	Terla mbat	Kepatu han (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Badan Kepegawaian Daerah	11	11	11	0	0	100,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	2	2	1	0	66,67
3.	Badan Keuangan Daerah	26	24	23	2	1	92,31
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	5	0	0	100,00
5.	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	136	132	132	4	0	97,06
6.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	7	0	0	100,00
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	5	5	0	0	100,00
8.	Badan Penghubung Daerah	3	3	3	0	0	100,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	33	33	32	0	1	100,00
10.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	43	43	43	0	0	100,00
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	4	4	0	0	100,00
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63	62	62	1	0	98,41
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	12	0	0	100,00
14.	Dinas Kesehatan	45	45	43	0	2	100,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	5	5	1	0	83,33
16.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	14	0	0	100,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	0	0	100,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	155	148	148	7	0	95,48
19.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	5	5	0	0	100,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	65	60	59	5	1	92,31
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	7	7	0	0	100,00
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	4	4	1	0	80,00
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	13	2	0	86,67
24.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37	34	34	3	0	91,89
25.	Dinas Perhubungan	48	47	47	1	0	97,92
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	18	18	0	0	100,00
27.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51	49	49	2	0	96,08
28.	Dinas Peternakan	26	26	25	0	1	100,00
29.	Dinas Sosial	18	17	16	1	1	94,44
30.	Inspektorat Daerah	82	82	82	0	0	100,00
31.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	32	32	29	0	3	100,00
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	4	4	2	0	66,67
33.	Sekretariat Daerah	65	63	62	2	1	96,92
34.	Sekretariat DPRD	7	6	6	1	0	85,71
35.	Staf Ahli	1	1	1	0	0	100,00
	Total	1060	1024	1013	36	11	

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris Daerah  
u.p.  
Asisten Pemerintahan dan Kesra,  
  
**Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196505161993032009



PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
PLH SEKRETARIS	

LAMPIRAN III

REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 31 MEI 2024

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
1	2	3	4	6	7
1.	Badan Kepegawaian Daerah	11	11	0	100,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	2	1	66,67
3.	Badan Keuangan Daerah	26	24	2	92,31
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	0	100,00
5.	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	136	132	4	97,06
6.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	0	100,00
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	5	0	100,00
8.	Badan Penghubung Daerah	3	3	0	100,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	33	33	0	100,00
10.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	43	43	0	100,00
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	4	0	100,00
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63	62	1	98,41
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	0	100,00
14.	Dinas Kesehatan	45	45	0	100,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	5	1	83,33
16.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	0	100,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	0	100,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	155	148	7	95,48
19.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	5	0	100,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	65	60	5	92,31
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	7	0	100,00
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	4	1	80,00
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	2	86,67
24.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37	34	3	91,89
25.	Dinas Perhubungan	48	47	1	97,92
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	18	0	100,00
27.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51	49	2	96,08
28.	Dinas Peternakan	26	26	0	100
29.	Dinas Sosial	18	17	1	94,44
30.	Inspektorat Daerah	82	82	0	100,00
31.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	32	32	0	100,00
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	4	2	66,67
33.	Sekretariat Daerah	65	62	3	95,38
34.	Sekretariat DPRD	7	6	1	85,71
35.	Staf Ahli	1	1	0	100,00
	Total	1060	1024	36	

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Asisten Pemerintahan dan Kesra,  
  
Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196505161993032009

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
PLH SEKRETARIS	




LAMPIRAN IV

REKAPITULASI PELAPORAN LHKPN PER PERANGKAT DAERAH  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NTT PER TANGGAL 30 JUNI 2024

No	Unit Kerja	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
1	2	3	4	6	7
1.	Badan Kepegawaian Daerah	11	11	0	100,00
2.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3	2	1	66,67
3.	Badan Keuangan Daerah	26	24	2	92,31
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	0	100,00
5.	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	136	132	4	97,06
6.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7	7	0	100,00
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5	5	0	100,00
8.	Badan Penghubung Daerah	3	3	0	100,00
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	33	33	0	100,00
10.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	43	43	0	100,00
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4	4	0	100,00
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	63	62	1	98,41
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	12	12	0	100,00
14.	Dinas Kesehatan	45	45	0	100,00
15.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6	5	1	83,33
16.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	14	14	0	100,00
17.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	0	100,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	155	148	7	95,48
19.	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	5	0	100,00
20.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	65	60	5	92,31
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	7	0	100,00
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5	4	1	80,00
23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15	13	2	86,67
24.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	37	34	3	91,89
25.	Dinas Perhubungan	48	47	1	97,92
26.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	18	18	0	100,00
27.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	51	49	2	96,08
28.	Dinas Peternakan	26	26	0	100
29.	Dinas Sosial	18	17	1	94,44
30.	Inspektorat Daerah	82	82	0	100,00
31.	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes	32	32	0	100,00
32.	Satuan Polisi Pamong Praja	6	4	2	66,67
33.	Sekretariat Daerah	65	62	3	95,38
34.	Sekretariat DPRD	7	6	1	85,71
35.	Staf Ahli	1	1	0	100,00
	Total	1060	1024	36	

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Sekretaris Daerah  
u.p.  
Asisten Pemerintahan dan Kesra,  
  
**Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196505161993032009

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
PLH SEKRETARIS	